

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) PADA MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Putri Ramadani¹, Emi Triani²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2026

Revised September 2026

Accepted September 2026

Available September 2026

putriramadani@students.usu.ac.id

[d](mailto:emi.triani@usu.ac.id)

emi.triani@usu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung akses dan keberlangsungan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap prosedur administrasi, kendala teknis pencairan bantuan, serta persepsi mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program KIP-K pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola Program KIP-K, lima mahasiswa penerima KIP-K, mahasiswa non penerima KIP-K, dan orang tua mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP-K

didukung oleh penyampaian informasi melalui berbagai media, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pengelola dalam memberikan pelayanan, serta prosedur kerja dan pembagian tugas yang jelas. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap prosedur administrasi, keterlambatan pencairan bantuan akibat transisi sistem keuangan, serta persepsi mengenai transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program KIP-K berperan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan verifikasi dan validasi data penerima melalui pemeriksaan dokumen yang lebih ketat serta survei lapangan secara selektif untuk meminimalisir kesalahan sasaran serta optimalisasi penyampaian informasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Program, KIP-K, George C. Edward III

ABSTRACT

The Indonesia Smart College Card Program (KIP-K) is an educational assistance program aimed at supporting access to and continuity of higher education for students from underprivileged families. However, its implementation still faces several challenges, including students' limited understanding of administrative procedures, technical issues in fund disbursement, and perceptions regarding the inaccurate targeting of beneficiaries. This study aims to examine the implementation of the KIP-K Program among students of the Faculty of Social and Political

Sciences, Universitas Sumatera Utara. This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the KIP-K Program administrators, five KIP-K recipient students, a non-recipient student, and a parent of a student. This study applied George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the KIP-K Program was supported by information dissemination through various media, adequate resources, the commitment of program administrators in providing services, and clear work procedures and division of responsibilities. However, several challenges were still identified, including students' limited understanding of administrative procedures, delays in fund disbursement due to the transition of the financial system, and perceptions regarding transparency and the accuracy of beneficiary targeting. This study concludes that the implementation of the KIP-K Program contributes to supporting the educational continuity of beneficiary students. Therefore, improvements are needed in transparency, strengthening the verification and validation of beneficiary data through stricter document examination and selective field verification to minimize targeting errors, as well as optimizing information dissemination to ensure more effective program implementation.

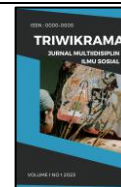
Keywords: Program Implementation, KIP-K, George C. Edward III

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan individu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu hambatan bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan maupun kebutuhan penunjang selama menjalani perkuliahan. Pemerintah melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi sekaligus mencegah mahasiswa berhenti kuliah karena persoalan ekonomi. Bantuan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa selama menjalani pendidikan.

Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan Program KIP-K. Berdasarkan data penerima KIP-K Universitas Sumatera Utara tahun 2022-2025 yang diperoleh peneliti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan fakultas dengan jumlah penerima KIP-K tertinggi ketiga, yaitu sebanyak 592 mahasiswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemilihan FISIP USU sebagai lokasi penelitian karena jumlah penerima yang cukup besar menunjukkan bahwa pelaksanaan program memiliki cakupan yang signifikan di lingkungan fakultas. Meskipun demikian, pelaksanaan KIP-K tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara, ditemukan mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami ketentuan administrasi, terutama ketika terdapat perubahan informasi mengenai persyaratan dan data sosial ekonomi. Selain itu, terdapat kendala terkait rekening yang tidak aktif, keterlambatan pencairan bantuan, serta koordinasi administratif. Di sisi lain, muncul pula persepsi yang berbeda di antara mahasiswa mengenai keterbukaan proses seleksi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut diterapkan oleh pelaksana. George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut digunakan dalam



penelitian ini untuk melihat bagaimana Program KIP-K dilaksanakan pada mahasiswa FISIP USU. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program KIP-K pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk peraturan atau keputusan tertulis, tetapi mencakup rangkaian proses mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap hasil kebijakan (Nugroho, 2003). Dalam bidang pendidikan, kebijakan publik menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial dan ekonomi.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang dapat membatasi keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan program, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan diterima oleh kelompok sasaran.

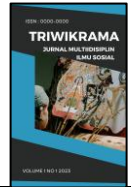
2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap ini keputusan yang telah ditetapkan diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup pengorganisasian sumber daya, mekanisme kerja, koordinasi antaraktor, serta pelayanan kepada kelompok sasaran. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum tentu mencapai tujuan apabila proses implementasinya tidak berjalan secara efektif (Hill & Hupe, 2022).

Dalam konteks Program KIP-K, implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana ketentuan program dijalankan pada tingkat perguruan tinggi dan diterima oleh mahasiswa sebagai kelompok sasaran. Pelaksanaan tersebut melibatkan proses penyampaian informasi, pelayanan administrasi, pengelolaan sumber daya, sikap pelaksana, serta mekanisme birokrasi. Dengan demikian, kajian implementasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan KIP-K dilaksanakan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan program.

3. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980; Jumroh & Pratama, 2021).



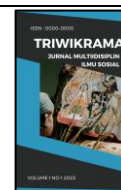
- a) Komunikasi; Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik diperlukan agar tujuan, prosedur, dan ketentuan program dapat dipahami secara tepat. Edward III membagi komunikasi ke dalam tiga aspek, yaitu *transmission* (penyampaian), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). Dalam pelaksanaan KIP-K, aspek ini digunakan untuk melihat bagaimana informasi program disampaikan dan dipahami oleh mahasiswa.
- b) Sumber Daya; Sumber daya merupakan dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya meliputi jumlah dan kemampuan staf, ketersediaan informasi, kewenangan pelaksana, serta fasilitas pendukung. Dalam implementasi KIP-K, sumber daya berkaitan dengan kemampuan pihak pengelola dan ketersediaan sarana yang mendukung pelaksanaan serta pelayanan program kepada mahasiswa.
- c) Disposisi; Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap mendukung terhadap kebijakan akan lebih mampu menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, disposisi dapat dilihat melalui komitmen pengelola, transparansi pelaksanaan program, serta respons terhadap permasalahan atau keluhan mahasiswa.
- d) Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur kerja, pembagian tugas, kewenangan, serta koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dapat mendukung pelaksanaan program secara terarah dan mengurangi terjadinya tumpang tindih tugas. Dalam pelaksanaan KIP-K, aspek ini dapat dilihat melalui standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas, serta monitoring dan evaluasi program.

4. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi yang bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi mengalami keterbatasan ekonomi. KIP-K merupakan pengembangan dari Program Bidikmisi dan menjadi bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini memberikan dukungan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk membantu keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

KIP-K pada dasarnya menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi hambatan ekonomi terhadap akses pendidikan tinggi. Keberadaan program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, implementasi KIP-K perlu dilihat tidak hanya berdasarkan keberadaan bantuan yang diberikan, tetapi juga dari proses pelaksanaannya sehingga program dapat mencapai kelompok sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori implementasi George C. Edward III digunakan sebagai landasan analisis untuk melihat pelaksanaan Program KIP-K pada mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara melalui empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. Sofyan No. 1, Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi penelitian dilakukan pada 5-24 April 2026 untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program KIP-K di lingkungan FISIP USU.

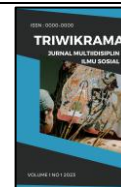
Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan Program KIP-K. Informan terdiri atas pengelola Program KIP-K pada Biro Rektorat/Direktorat Beasiswa USU, lima mahasiswa penerima KIP-K, dua mahasiswa nonpenerima KIP-K, serta satu orang tua mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan, kendala, dan kondisi implementasi Program KIP-K pada mahasiswa FISIP USU.

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda. Informasi mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada mahasiswa FISIP USU tidak hanya diperoleh dari informan utama, yaitu mahasiswa penerima KIP-K, tetapi juga diperkuat melalui keterangan dari pegawai Direktorat Beasiswa Divisi Pengelola Beasiswa sebagai informan kunci serta mahasiswa non penerima KIP-K dan orang tua mahasiswa penerima KIP-K sebagai informan tambahan. Melalui perbandingan berbagai sumber informasi tersebut, penulis dapat melihat kesesuaian data terkait pelaksanaan program, proses penyaluran bantuan, manfaat program bagi mahasiswa, serta berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi KIP-K di lingkungan FISIP USU. Dengan demikian, informasi yang diperoleh menjadi lebih valid karena didukung oleh berbagai sudut pandang informan yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Program KIP-K dilakukan melalui berbagai saluran informasi, seperti website resmi, media sosial, grup WhatsApp, serta penyampaian informasi melalui fakultas dan program studi. Mahasiswa juga memperoleh informasi melalui organisasi mahasiswa penerima KIP-K, seperti Gamadiksi USU. Penggunaan berbagai media tersebut memudahkan penyebaran informasi mengenai pendaftaran, persyaratan, kewajiban penerima, serta proses administrasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami informasi dasar mengenai KIP-K, termasuk hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan ketika terdapat perubahan ketentuan administrasi, khususnya terkait data sosial ekonomi, desil, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam kondisi tertentu, mahasiswa perlu mencari informasi tambahan secara mandiri untuk memahami ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah berjalan, tetapi aspek kejelasan dan



konsistensi informasi masih perlu diperkuat. Informasi yang berkaitan dengan perubahan kebijakan sebaiknya disampaikan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara mahasiswa.

Sumber Daya

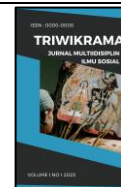
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan KIP-K di FISIP USU, sumber daya meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Dari hasil penelitian, pengelolaan Program KIP-K didukung oleh tenaga pelaksana yang memiliki tugas dalam mengelola proses administrasi dan pelayanan program. Ketersediaan website, media sosial, serta sarana komunikasi digital juga mendukung penyampaian informasi kepada mahasiswa. Pada tingkat fakultas, mahasiswa dapat memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan administratif yang berkaitan dengan proses akademik maupun dokumen yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis. Salah satunya berkaitan dengan rekening penerima yang tidak aktif atau mengalami kendala sehingga dapat memengaruhi proses pencairan bantuan. Selain itu, terdapat mahasiswa yang mengalami keterlambatan menerima dana bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya secara umum telah mendukung implementasi, tetapi koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menyelesaikan kendala pencairan dan administrasi.

Disposisi Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola Program KIP-K menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Pengelola juga memberikan respons terhadap berbagai pertanyaan dan keluhan yang disampaikan mahasiswa mengenai proses administrasi maupun pencairan bantuan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai transparansi pelaksanaan program, terutama dalam proses penetapan penerima. Sebagian mahasiswa menilai proses seleksi telah dilakukan dengan cukup ketat berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Namun, terdapat pula mahasiswa yang mempertanyakan apakah seluruh penerima telah benar-benar memenuhi kondisi ekonomi yang menjadi dasar pemberian bantuan. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan KIP-K. Transparansi tidak hanya diperlukan dalam penyampaian persyaratan, tetapi juga dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme verifikasi dan penetapan penerima. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP-K telah memiliki tahapan kerja yang cukup jelas, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan dokumen, seleksi, penetapan penerima, hingga monitoring dan evaluasi. Pembagian tugas antara pihak pengelola di tingkat universitas dan fakultas juga mendukung pelaksanaan program. Pengelola pada tingkat universitas menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan program secara lebih luas, sedangkan pihak fakultas membantu mahasiswa dalam persoalan administratif yang berkaitan dengan lingkungan fakultas. Monitoring terhadap mahasiswa



penerima juga dilakukan melalui pemantauan akademik pada setiap semester. Selain itu, terdapat pemeriksaan lapangan secara selektif terhadap calon penerima untuk membantu memastikan kondisi yang disampaikan dalam dokumen sesuai dengan keadaan sebenarnya. Mekanisme tersebut penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan sasaran penerima. Namun, proses verifikasi dan validasi masih perlu diperkuat. Pemeriksaan dokumen secara lebih teliti, pencocokan data sosial ekonomi, serta survei lapangan secara selektif dapat menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan sasaran. Dengan struktur kerja yang jelas dan pengawasan yang lebih optimal, pelaksanaan KIP-K diharapkan dapat semakin tepat sasaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

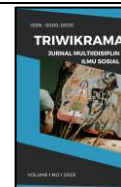
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan program ditinjau melalui empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, informasi program telah disampaikan melalui berbagai media, namun kejelasan dan konsistensi informasi terkait ketentuan administratif masih perlu ditingkatkan. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh pengelola, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang memadai, meskipun masih ditemukan kendala administratif, rekening tidak aktif, dan keterlambatan pencairan bantuan. Pada aspek disposisi, pengelola menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan, tetapi transparansi mengenai seleksi dan penetapan penerima masih perlu diperkuat untuk mengurangi perbedaan persepsi mahasiswa mengenai ketepatan sasaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan tahapan pelaksanaan telah berjalan cukup jelas, namun proses verifikasi dan validasi data penerima masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, implementasi Program KIP-K di FISIP USU dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Perbaikan terutama diperlukan pada kejelasan informasi, transparansi seleksi, verifikasi dan validasi data, kelancaran pencairan bantuan, serta koordinasi antar pihak agar pelaksanaan KIP-K semakin efektif dan tepat sasaran bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

Saran

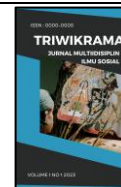
Berdasarkan hasil penelitian, pengelola Program KIP-K Universitas Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat proses verifikasi dan validasi data melalui pemeriksaan silang dokumen, pemanfaatan data sosial ekonomi, dan survei lapangan secara selektif agar bantuan lebih tepat sasaran. Mahasiswa penerima maupun calon penerima juga diharapkan lebih proaktif dalam memperoleh informasi, memahami ketentuan program, memberikan data sesuai kondisi sebenarnya, serta segera melaporkan perubahan data atau



kendala administrasi. Sementara itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi Program KIP-K dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyah, E. N., Meilani Meilani, Muhammad Fawwaz, Aprilia, S. N., Salma Adriyani Putri Saptaji, Rama Wijaya Abdul Rozak, & Heni Mulyani. (2023). Beasiswa KIP-K: Apakah Beasiswa Dapat Menjadi Motivasi Belajar Mahasiswa? *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 309–318.
<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1496>
- Angraini, H., Syamsuri, S., Lion, E., et al. (2024). Efektivitas Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Memenuhi Kebutuhan Mitra Di Bps Kabupaten Seruyan. *Innovative: Journal Of Social Research*, 4, 5830–5845.
- Christy, E. N., Latifa, R., Purwatitisari, N., Prabowo, P. A. R., & Harmawan, B. N. (2024). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 9(2), 134–141.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3059>
- Dani, E. L. H. A. R. (2025). Evaluasi Program KIP Kuliah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), 179–196.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2008). *Metode-metode riset kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, I., Izati, N., Ramadhani, F., Sandi, M., Arnanda, F., Negara, I. A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Kuning, L. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi. 9, 34150–34156.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. CV Insan Cendikia Mandiri.
- Kemdiktisaintek. (2026). *Anggaran KIP Kuliah Terus Meningkat, Pemerintah Pastikan Akses Pendidikan Tinggi Tetap Terjaga*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia.
<https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/anggaran-kip-kuliah-terus-meningkat-pemerintah-pastikan-akses-pendidikan-tinggi-tetap-terjaga>
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., Neisya, S., & Isyak, R. (2022). Analisis kebijakan program beasiswa kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di univesitas. 5.
- Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 331–340.
<https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166>
- Nasution, E. S. (2024). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nugroho. (2003). *Formulasi implementasi, dan evaluasi kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>



- Purnamasari. (2023). Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Putri, N. A., Evelonia, R., Siburian, H., Hayani, Z., & Siregar, H. (2024). Benefits and Effectiveness of the KIP Lecture Program for Recipient Students in Accessing Education at Higher Education. 2, 1–7.
- Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1–16. <https://doi.org/10.61292/shkr.233>
- Rini, P. P., Muhyidin, A., & Atikah, C. (2024). Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan tinggi (Studi Kasus Universitas Salakanagara). *Metakognisi: Jurnal Kajian Pendidikan*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.57121/meta.v6i2.121>.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238–251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Sekretaris, P., & Pendidikan, K. (2023). *Undang-Undang Nomor*.
- Sembiring. (2023). Analisis Beasiswa KIP Kuliah dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan Tahun 2023. 4(2), 22.
- Sibarani, C. W., Husin, A., & Helmi, H. (2025). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. *TAKSONOMI: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(1), 72–79.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Universitas Sumatera Utara. (2026). About Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Diakses pada 26 Januari 2026 dari <https://www.usu.ac.id/id/tentang-usu>
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Wildan, A. S. (2025). *KIP Kuliah 2025: Anggaran dan Jumlah Penerima Terus Meningkat, Ini Faktanya!* GoodStats. <https://goodstats.id/article/kip-kuliah-2025-anggaran-dan-jumlah-penerima-terus-meningkat-ini-faktanya>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo